

DIMENSI ONTOLOGIS PANCASILA DALAM FILSAFAT KEBANGSAAN

Cepi Ridwan Faisal

Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

cepidwan254@gmail.com

ARTICLE INFO Article
History: Received Date: 10th
March 2026 Received in
Revised Form Date: 27th
March 2026 Accepted Date:
29th March 2026 Published
online Date 31th March
2026.

Keyword: Ontologi Pancasila,
Filsafat Pancasila, Ideologi
Negara.

ABSTRACT

Pancasila as the foundation of the state and the way of life of the Indonesian people not only functions in regulations and politics, but also has a deep philosophical meaning, especially in the ontological part. The ontological dimension of Pancasila is related to how to understand the nature of human existence, society, and communal life based on the values of divinity, humanity, unity, mutual cooperation, and justice. This study aims to analyze the nature and structure of the ontological dimension of Pancasila and its relevance in the life of the nation today. This study uses a qualitative approach with a literature study method, with data sources in the form of books on Pancasila philosophy, scientific journal articles, and related academic works. Data were analyzed through a qualitative approach with the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that Pancasila is a philosophical system with a unique ontology, namely viewing humans as beings with two individual and social natures and considering spiritual, moral, and social values as an important part of state and national life. An ontological understanding of Pancasila is crucial so that it is not merely seen as a symbol of rules, but also can be applied to address modern challenges such as identity crises, shifting values, and the fragmentation of society. Therefore, it is crucial to conduct an ontological study of Pancasila so that it remains a living philosophical system for the nation and is able to reflect current social conditions.

PENDAHULUAN

Bahasa dan pola pikir kritis merupakan dua aspek yang memiliki keterkaitan erat dalam proses pembelajaran, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Latar Belakang Masalah: Sinergi Bahasa dan Pola Pikir Kritis menunjukkan bahwa kualitas suatu argumentasi atau penalaran sangat bergantung pada cara argumentasi tersebut diekspresikan melalui bahasa. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi pasif, tetapi juga sebagai wadah, pencermin, dan bahkan pembentuk proses berpikir. Pola pikir kritis (PPC), yang didefinisikan sebagai proses berpikir yang bertujuan, disiplin, mandiri, dan rasional dalam mengevaluasi informasi, memerlukan bahasa yang terstruktur dan presisi agar dapat diinternalisasi dan dikomunikasikan secara efektif. Oleh karena itu, pengkajian simultan terhadap bahasa dan PPC menjadi hal yang sangat penting dalam konteks pendidikan bahasa.

Berdasarkan Teori dan Kutipan Ahli Mutakhir, teori klasik dari Vygotsky (1978) yang menekankan adanya interaksi dinamis antara pikiran dan bahasa masih relevan dan terus diperbarui untuk menjelaskan hubungan ini pada konteks kekinian. Sebagaimana dikemukakan oleh Richard Paul dan Linda Elder dalam penelitian tahun 2021, “Keterampilan berpikir kritis sangat penting dan berfungsi secara efektif dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis ini sangat penting dan harus ditanamkan lebih awal di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.” Penekanan keterampilan berpikir kritis khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga dianggap suatu langkah esensial untuk memberikan pendidikan yang holistik dan relevan dalam menghadapi tuntutan global, sebagaimana ditegaskan oleh Safitri dkk. (2020): “...penekanan pada keterampilan berfikir kritis dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi suatu langkah yang esensial untuk memberikan pendidikan yang holistik dan relevan dalam menghadapi tuntutan global.”

Penelitian mutakhir di Indonesia, seperti yang ditemukan di SMP Negeri 11 Bengkulu Tengah (2024), menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih terbatas pada tingkatan dasar hingga analisis (C1-C4), dengan faktor motivasi, sikap, dan metode pembelajaran sangat mempengaruhi perkembangan pola pikir kritis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan

Kurikulum Merdeka yang memberi kesempatan pada pembelajaran yang mandiri dan kolaboratif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Dalam praktik pendidikan di sekolah, terkhusus pada jenjang SMA, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat kemampuan siswa dalam mengembangkan pola pikir kritis melalui bahasa. Fenomena umum yang ditemukan adalah kesulitan siswa dalam menyampaikan pendapat secara logis, terstruktur, dan argumentatif. Gejala yang sering muncul meliputi penggunaan bahasa yang tidak jelas (ambigu) atau tidak koheren saat berdiskusi, kesulitan dalam menyusun proposisi atau hubungan antar konsep, serta rendahnya kemampuan menarik inferensi logis dan mendukung argumen dengan alasan atau bukti yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pola pikir kritis siswa secara langsung berpengaruh pada bentuk dan isi penggunaan bahasa mereka.

Penelitian terdahulu juga mengonfirmasi fenomena ini, seperti yang ditemukan oleh Purnamasari (2020) dan Supandi (2017, dalam penelitian tahun 2022) yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan berpikir logis di kalangan siswa SMA masih banyak dijumpai, salah satunya karena siswa kurang terbiasa mengemukakan pendapat secara kritis. Oleh karena itu, melakukan studi kasus pada siswa SMA Hang Tuah 4 Surabaya diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang spesifik dan terperinci mengenai keterkaitan antara bahasa dan pola pikir kritis dalam ranah pendidikan.

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam artikel ini berkaitan Bagaimana bentuk penggunaan bahasa siswa SMA Hang Tuah 4 Surabaya? Bagaimana pola pikir kritis mereka tercermin melalui penggunaan bahasa? Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan bentuk penggunaan bahasa siswa dan menganalisis keterkaitan bahasa dengan pola pikir kritis. Sedangkan manfaat yang diharapkan berupa 1) Teoritis: Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian bahasa dan pola pikir kritis dalam konteks pendidikan bahasa di SMA, khususnya terkait refleksi penggunaan bahasa sebagai cerminan pola pikir kritis siswa. 2) Praktis: Menjadi acuan bagi pendidik dan praktisi pembelajaran bahasa dalam merancang strategi pengajaran yang memadukan pengembangan bahasa dan pola pikir kritis siswa secara efektif dan relevan dengan kebutuhan kurikulum serta kondisi siswa di SMA Hang Tuah 4 Surabaya.

Sejumlah penelitian telah menunjukkan keterkaitan antara kemampuan berbahasa dan pola pikir kritis. McCann dan Vitanova (2019) dalam studi psikolinguistik mereka

menemukan bahwa siswa yang mampu menggunakan struktur sintaksis kompleks, seperti klausa subordinatif, cenderung menghasilkan argumen yang lebih kuat dan bernuansa kritis. Sebaliknya, kelemahan dalam kohesi dan koherensi linguistik sering dikaitkan dengan kegagalan dalam penalaran logis. Penelitian lain oleh Purnamasari (2020) di Indonesia menunjukkan bahwa siswa SMA sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi asumsi dan menarik kesimpulan yang valid dalam teks. Kesulitan ini tercermin dalam ketidakmampuan mereka menyusun kalimat atau paragraf yang mendukung pendapat mereka secara logis. Temuan ini menegaskan bahwa kelemahan dalam keterampilan berpikir kritis termanifestasi secara linguistik. Selain itu, Mercer dan Sams (2021) menyoroti peran bahasa dalam instruksi kelas sebagai mediator dalam pengembangan penalaran kolektif. Interaksi verbal antara guru dan siswa berkontribusi pada pembentukan kemampuan berpikir kritis secara kolaboratif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa gagasan, konsep, dan pemikiran filosofis mengenai dimensi ontologis Pancasila yang terdapat dalam berbagai sumber tulisan. Data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti buku tentang filsafat Pancasila, artikel jurnal nasional, dokumen resmi pemerintah, serta karya ilmiah yang membahas ontologi, filsafat, dan pemikiran kebangsaan. Sumber-sumber tersebut dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan ontologi Pancasila. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis isi secara kualitatif, yaitu dengan mengeksplorasi makna, konsep, dan pola pemikiran yang terkandung dalam teks. Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan terstruktur mengenai struktur serta ciri-ciri dimensi ontologis Pancasila. Untuk memastikan keandalan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan dari berbagai penulis dan disiplin ilmu agar diperoleh konsistensi dan kedalaman analisis. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis, sehingga dapat menjelaskan Pancasila sebagai

sistem ontologis yang utuh dan relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang konseptual, komprehensif, dan argumen yang kuat mengenai ontologi Pancasila sebagai dasar filsafat kebangsaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat dan Struktur Dimensi Ontologis Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki dimensi ontologis yang menyatukan seluruh sistem filsafatnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ontologi Pancasila memandang dunia bukan hanya secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang mencakup beberapa aspek, seperti ketuhanan, kemanusiaan, sosial, dan keadilan. Setiap sila dalam Pancasila merepresentasikan satu aspek keberadaan yang saling terkait dan membentuk struktur ontologis yang utuh. Dengan kata lain, Pancasila tidak bisa dianggap hanya sebagai sekumpulan aturan, tetapi lebih dari itu, merupakan cara pandang tentang hakikat kehidupan bangsa Indonesia (Wira Ramdhani 2021). Dalam hal struktur ontologis, Pancasila melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki dua sifat, yaitu individu dan sosial.

Dalam pandangan Pancasila, manusia tidak dianggap sebagai entitas yang bisa hidup sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan orang lain, masyarakat, dan Tuhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia menurut Pancasila bersifat hubungan dan memiliki makna yang baik. (et al. 2020) menekankan bahwa konsep ini menjadi dasar untuk membentuk etika sosial dan kehidupan yang adil dalam masyarakat. Berdasarkan analisis lebih lanjut, lima sila Pancasila membentuk hierarki ontologis yang sistematis. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar yang transenden yang memengaruhi seluruh sila lainnya. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam dunia sosial. Struktur hierarki ini menunjukkan arah keberadaan Pancasila yang jelas, yaitu menuju kehidupan bersama yang bermartabat dan adil. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian (Wira Ramdhani 2021) yang menyatakan bahwa dimensi filosofis Pancasila bersifat utuh dan memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian, hakikat ontologis Pancasila adalah pandangan hidup yang menggabungkan aspek transenden, manusiawi, dan sosial secara seimbang. Ontologi Pancasila menawarkan kerangka keberadaan yang khas dan sesuai dengan

kondisi bangsa Indonesia. Keunikan ini membuat ontologi Pancasila berbeda dari ideologi lain yang cenderung fokus pada aspek material dan individual (Suharno 2017).

2. Dimensi Ontologis Pancasila

Secara umum, ontologi Pancasila melihat dunia sebagai satu kesatuan yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Dalam konsepnya, Pancasila mengakui adanya Tuhan, martabat manusia, serta pentingnya hidup bersama sebagai dasar dari realitas. Pandangan ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak memisahkan antara dunia spiritual dan dunia sosial, melainkan menganggap keduanya sebagai satu kesatuan yang saling terkait (et al. 2020). Dalam tingkat yang lebih spesifik, dimensi ontologis Pancasila terlihat dalam hubungan nyata antara individu, masyarakat, dan negara. Individu dianggap sebagai makhluk yang memiliki martabat, hak, serta kewajiban. Sementara itu, masyarakat dan negara berperan sebagai tempat aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ontologi Pancasila dengan demikian menolak pandangan yang terlalu berfokus pada diri sendiri secara ekstrem maupun pada kelompok secara total, dan menawarkan prinsip keseimbangan sebagai bentuk kehidupan sosial yang ideal (Muin 2022). Selanjutnya, penerapan ontologi Pancasila dalam kehidupan modern membutuhkan pemahaman yang sesuai dengan konteks dan reflektif. (Vitanka 2023) menegaskan bahwa nilai-nilai ontologis Pancasila harus diubah menjadi praktik dalam kehidupan sosial, agar tidak hanya berhenti di tingkat ideal. Oleh karena itu, ontologi Pancasila perlu dipahami sebagai kerangka pemikiran yang hidup dan berubah seiring dengan perkembangan kehidupan sosial, bukan sekadar konsep yang tidak berubah dan terpisah dari realitas nyata.

3. Keterkaitan Dimensi Ontologis Pancasila dengan Ontologi

Dimensi ontologis Pancasila memiliki hubungan erat dengan teori ontologi dalam bidang filsafat, terutama ontologi sosial dan filsafat nilai. Ontologi adalah bagian dari filsafat yang membahas sifat keberadaan dan struktur realitas dasar. Dalam konteks ini, Pancasila bisa dipahami sebagai sistem ontologis yang menganggap manusia dan nilai kemanusiaan sebagai realitas utama yang menggerakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Muin 2022) Teori ontologi sosial menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui hubungan antar individu yang dihubungkan oleh nilai dan norma bersama. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila sesuai dengan teori ini,

karena menempatkan hubungan sosial yang adil dan beradab sebagai realitas ontologis dalam kehidupan bersama. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran (et al. 2020) yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar ontologis bagi etika sosial bangsa Indonesia.

Selain itu, teori filsafat nilai (aksiologi) juga berkaitan erat dengan ontologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak dimaknai sebagai konstruksi subjektif, melainkan sebagai realitas objektif yang terkait dengan hakikat manusia dan kehidupan sosial. (Wira Ramdhani 2021) menegaskan bahwa keterpaduan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang terpadu dan komprehensif. Dari perspektif filsafat ilmu, ontologi Pancasila berperan sebagai dasar untuk pembentukan pengetahuan dan kebijakan publik. (Vitanka 2023) menyatakan bahwa tanpa pemahaman ontologis yang kuat, penerapan Pancasila cenderung bersifat formal dan kehilangan makna filosofisnya. Oleh karena itu, studi ontologis Pancasila penting untuk memperkuat dasar konseptual dalam pengambilan keputusan sosial dan politik.

Selain itu, keterkaitan antara ontologi Pancasila dan teori filsafat juga terlihat dalam upaya menghadapi tantangan modernitas. Individualisme, materialisme, dan relativisme nilai menuntut adanya kerangka ontologis yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, ontologi Pancasila menyajikan alternatif teoretis yang relevan dan kontekstual (Sulianti et al. 2020) Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dimensi ontologis Pancasila tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang luas. Integrasi antara ontologi Pancasila dan teori filsafat memberikan dasar yang kuat bagi penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan kehidupan berbangsa yang adil dan bermartabat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa Pancasila harus dipahami dan dikembangkan sebagai sistem filsafat yang hidup dan reflektif (Tunjung Bayu Sinta 2019).

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat kebangsaan yang memiliki dimensi ontologis kuat dan khas. Ontologi Pancasila melihat kehidupan secara utuh, dengan menempatkan manusia Indonesia sebagai makhluk monodual, yaitu individu yang sekaligus makhluk sosial, yang memiliki keimanan, nilai moral, dan keadilan. Setiap sila dalam Pancasila saling terhubung dalam satu sistem yang utuh, mencerminkan sifat asli manusia, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, Pancasila tidak bisa dianggap hanya sebagai kumpulan aturan atau dokumen ideologi formal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dimensi ontologis Pancasila berperan sebagai dasar dalam membentuk etika sosial dan kehidupan berbangsa yang adil serta bermartabat. Pancasila menolak pandangan yang terlalu berfokus pada individualisme ekstrem atau kolektivisme total, serta menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama sebagai bentuk kehidupan sosial yang ideal. Dalam konteks ini, negara dianggap sebagai wujud dari kehendak bersama yang berasal dari martabat manusia, bukan sekadar entitas terpisah dari rakyat. Lebih lanjut, kajian ini menegaskan bahwa pemahaman ontologis Pancasila yang lemah dalam praktik kehidupan berbangsa disebabkan oleh dominasi pendekatan normatif-legalistik yang mengabaikan aspek filosofisnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kajian ontologis Pancasila agar Pancasila tetap menjadi pandangan hidup yang reflektif, kontekstual, dan relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan modernitas, seperti krisis identitas nasional, kebingungan nilai, dan fragmentasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa pemahaman ontologis Pancasila merupakan fondasi penting dalam pengembangan filsafat kebangsaan dan penguatan kehidupan berbangsa serta bernegara yang adil dan bermartabat

REFERENSI

- Arifin, Syamsul, Agus H. Sulistiyono, Reksoprodjo Fauzia, and Gustarina Cempaka. 2023. "Pancasila Sebagai Asal Mula Ideologi Bangsa Dan Negara Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(2):h. 2505.
- Hardiyanto, Lutfi, A. Irawatie, and Saryono Saryono. 2025. "Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengasah Kritisisme Masyarakat Modern." *Jurnal Citizenship Virtues* 5(1):47–61. doi:10.37640/jcv.v5i1.2274.
- Jafar, Muslim, and Devy Aisyah. 2022. "Muslim Jafar 1 , Devy Aisyah 2 , Amrina 3." 2338(4):13–34.
- Muin, F. 2022. "Tektualitas Dan Kontektualitas Pancasila Dalam Paradigma Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(2):4109–13. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3658>.
- Pristiwiyanto. 2021. "Pancasila Dalam Kajian Filsafat :." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1(2):253–62.
- Si Pujiati, and Ilyya Muhsin. 2020. "Http://Journal.Umpo.Ac.Id/Index.Php/JPK/Article/View/2187." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5(2):13–22. doi:10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp13-22.
- Suharno. 2017. "Urgensi Revitalisasi Pancasila Dalam Membangun Karakter Kebangsaan Suharno." *Journal* 2(1):23–33. doi:10.24269/jpk.v5.n1.2020.
- Sulianti, Ani, Yusuf Efendi □, and Halimatus Sa'. 2020. "JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (Print) Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Lembaga Pendidikan." *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5(1):54–65. doi:10.24269/jpk.v5.n1.2020.
- Tunjung Bayu Sinta, Hanifah. 2019. "JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4(1):65–77.
- Vitanka, Potrika Janno. 2023. "Ontological Relations of the 1945 Basic Act as the Constitution with Pancasila as the State Ideology." *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities* 6(2):139–53. doi:10.33019/berumpun.v6i2.116.
- Wira Ramdhani, Supriyo. 2021. "Analisis Linguistik Pancasila Berdasarkan Epistemologi, Ontologi, Dan Aksiologi." *Metallanguage: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra Indonesia* 2(02 Oktober). doi:10.56707/jmela.v2i02/2021/10.72.